BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Tempat Kerja Praktek

DRPD Kabupaten Bandung merupakan pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl.Soreang Km.17.

Penjabaran mengenai profil DPRD Kabupaten Bandung meliputi sejarah singkat, visi dan misi dari DPRD Kabupaten Bandung, logo instansi yang digunakan oleh Desa Pangauban, struktur organisasi dan *Job Description* perangkat DPRD Kabupaten Bandung, dan badan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten Bandung memiliki visi dan misi dalam perusahaannya diantaranya :

2.1.1. Visi

Terwujudnya Lembaga Legislatif yang responsif, transparan dan partisipatif dengan mengedepankan akhlakul karimah.

2.1.2. Misi

- Meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan dan fungsi budgeter yang berahlakul karimah.
- Menumbuhkembangkan sinergi antar Alat-alat kelengkapan DPRD.
- Mewujudkan transparansi kelembagaan.
- Mendorong terwujudnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan terciptanya aparatur yang Bersih dan Berwibawa.
- Meningkatkan Partisipasi Publik dalam pengambilan keputusan lembaga.

- Menumbuh kembangkan komunikasi efektif antara Fraksi dengan masyarakat pemilih.

2.1.3. Sejarah DPRD Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah **Soreang**. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6Â°,41' - 7Â°,19' Lintang Selatan dan diantara 107Â°22' - 108Â°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan,perdagangan dan jasa.

2.1.4. Logo DPRD Kabupaten Bandung

Desain logo pemerintah DPRD Kabupaten Bandung adalah pembeda visual suatu wilayah dengan wilayah lain .

Arti dari logo yang terlihat pada gambar 2.1 di DPRD Kabupaten Bandung Lambang berbentuk perisai terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- **Bagian kanan atas berlatar kuning emas**

Dengan gambar gunung (Gb. Tangkuban Perahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa Kabupaten Bandung termasyhur karena tanahnya yang

subur di daerah bergunung-gunung, dan sebagai ciri memiliki gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.

- **Bagian melintang bergerigi**

  Merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwrna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh dan kuat, baik secara fisik dalam membendung hawa nafsu.

- **Pohon kina berwarna hijau dan belatar belakan merah**

  Melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun air danau. Kabupaten Bandung di lintasi oleh sungai citarum, sungai cikapundung, dan sungai sungai kecil lainnya. Kabupaten Badnung danau/situ patenggang, situ lembang, situ ciburuy, dan danau danau lainnya.

- **Dibawah perisai tertulis dalam pita kuning : REPEH RAPIH KERTARAHARJA**

Artinya :

REPEH : Suasana kehidupan yang aman dan tentram.

RAPIH : Suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih sehat dan asri.

KERTARAHARJA : Tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata.



Gambar 2.1. Logo DPRD Kabupaten Bandung

2.1.5. Badan Hukum Instansi

Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat **DPRD**) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah_daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

- Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.1.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam suatu instansi dalam menjalin kegiatan kerja untuk mencapai tujuan. Gambar 2.2. merupakan struktur organisasi dari DPRD Kabupaten Bandung yang terdiri dari :

- Sekretaris DPRD.
- Bagian umum membawahi, sub bagian ketatausahaan, sub bagian rumah tangga, sub bagian humas protokol.
- Bagian persidangan membawahi, sub bagian program dan pelaporan, sub bagian rapat dan risalah, sub bagian alat kelengkapan DPRD.
- Bagian hukum dan perundang-undangan membawahi, sub bagian produk DPRD, sub bagian pengkajian dan pengembangan hukum, sub bagian pengolahan data dokumentasi dan perpusatakaan.
- Bagian keuangan membawahi, sub bagian anggaran, sub bagian verifikasi, sub bagian akutansi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG



Gambar 2.2. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bandung

2.1.7 Job Description

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di pemerintah DPRD Kabupaten Bandung, meliputi :

1. Sekretaris DPRD

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

2. Bagian Umum

Tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, protokoler dan kehumasan, dengan rincian program sebagai berikut :

a. Sub Bagian Ketatausahaan.

- Pengaturan dan pelayanan ketatatusahaan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.
- Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas, dan pengelolaan kearsipan serta pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- Pengelolaan dan penyiapan bahan kearsipan, seperti membuat kartu kendali, menyiapkan rak serta depo penyimpanan arsip.
- Pengadaan, dan penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor.
- Pembinaan pegawai, pengelolaan dokumentasi kepegawaian mengenai kenaikan pangkat pensiun dan sebagainya.
- Mengirimkan peserta untuk mengikuti Diklat.

b. Sub Bagian Rumah Tangga

- Pengurusan rumah tangga Sekretariat DPRD.
- Pemeliharaan dan perawatan barang inventaris gedung, kantor kendaraan serta fasilitas lainnya.
- Pengurusaan akomodasi kegiatan kepentingan DPRD.

- Kodefikasi/inventarisasi barang-barang Sekretariat DPRD.
- Pengawasan, penjagaan keamanan, ketertiban, kebersihan kantor dan kegiatan DPRD dengan segala fasilitasnya.
- Pengawasan, penertiban, pengamanan terhadap tamu dan masyarakat.
- Membuat jadwal jaga piket.

3. Sub Bagian Protokol Dan Humas

- Penyusunan perencanaan teknis operasional kehumasan dan keprotokolan.
- Penyusunan rumusan kebijaksanaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Memberi pelayanan aspirasi terhadap masyarakat.
- Pengaturan waktu dan jadwal kegiatan DPRD.
- Pelaksanaan pemberitaan dan kehumasan Sekretariat dan alat–alat kelengkapan DPRD.
- Memfasilitasi kunjungan tamu.

4. Bagian Persidangan

Tugas pokok Bagian Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian pelayanan persidangan, yang meliputi penyusunan program dan pelaporan DPRD, pelayanan rapat dan risalah, serta pelayanan administrasi alat kelengkapan DPRD.

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

- Penyusunan perencanaan teknis operasional, penyusunan program pelaporan DPRD.

- Pengkoordinasian pelayanan administrasi kegiatan program Komisi dan kepanitiaan.
- Evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana dan program kerja DPRD.
- Penyusunan pelaporan kegiatan DPRD.

b. Sub Bagian Rapat Dan Risalah.

- Penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi rapat dan pengelolaan risalah.
- Penyiapan dan pengadaan bahan rapat dan risalah/ persidangan DPRD.
- Pembuatan risalah hasil rapat serta penggandaan bahan persidangan DPRD.
- Pencatatan dalam kegiatan rapat dan risalah/persidangan DPRD.

c. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD

- Penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi dan pengembangan alat-alat kelengkapan DPRD.
- Pelayanan administrasi terhadap alat-alat kelengkapan DPRD.
- Fasilitasi pengembangan alat-alat kelengkapan DPRD.

d. Bagian Hukum Dan Perundang-undangan

Tugas Pokok Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pelayanan di bidang hukum dan perundang-Undangan meliputi pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan, pengkajian dan pengembangan hukum, penyusunan produk DPRD dan perundang-undangan, pelayanan fasilitasi materi hukum bagi kegiatan DPRD.

a. Sub Bagian Pengolahan Data, Dokumentasi dan Perpustakaan.

- Penyajian data yang lengkap dan akurat untuk bahan kegiatan DPRD, bagi kepentingan Pimpinan Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan referensi bahan-bahan kepustakaan.
- Memberikan bahan masukan dan telaahan data yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagai bahan pengambilan keputusan Pimpinan.
- Menghimpun data hasil masukan/inspirasi dari para Anggota DPRD maupun dari alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung.
- Mengkoordinasikan penyajian data dengan SKPD dan Instansi terkait dalam memberikan informasi/masukan data sebagai bahan kegiatan DPRD.

b. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum

- Pengkajian terhadap permasalahan baik yang masuk ke DPRD maupun hal lain yang berkembang di masyarakat di inventarisasi pada lingkup bidang ideologi, sosial, politik, budaya dan agama.
- Menyampaikan suatu pertimbangan terhadap munculnya persoalan dengan memberikan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang harus ditangani dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemberian pertimbangan hukum atau konsultasi bagi Anggota DPRD maupun alat kelengkapan DPRD dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis
- Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap rencana kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian lain.
- Melakukan koordinasi dengan SKPD, instansi terkait, dll.
- Pengkajian terhadap informasi potensi daerah, kewenangan daerah, produk hukum serta peraturan lainnya.
- Evaluasi dan pengembangan terhadap produk hukum hasil kegiatan DPRD.
- Pemberian pertimbangan hukum terhadap DPRD.
- Inventarisasi setiap hasil produk-produk hukum DPRD.

c. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-Undangan.

- Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebagai Hak Inisiatif DPRD.
- Penyusunan produk DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Rekomendasi DPRD.
- Mengkoordinasikan pengkajian dan pengembangan produk DPRD dan perundang-undangan dengan Sub Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD.

d. Bagian Keuangan

Tugas Pokok Bagian Keuangan adalah merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran, pembukuan dan verifikasi.

1) Sub Bagian Anggaran.
   - Penyusunan, perencanaan dan pengelolaan administrasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
   - Pengaturan keuangan sesuai dengan posnya.
   - Penyusunan anggaran pasal-demi pasal.
   - Kegiatan lainnya yang menyangkut anggaran.

2) Sub Bagian Akuntansi.
   - Pelaksanaan, Pencatatan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
   - Neraca keuangan kegiatan Sekretariat dan DPRD.
   - Penanganan buku keuangan lainnya.
   - Laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran Sekretariat dan DPRD Kabupaten Bandung.

3) Sub Bagian Verifikasi.
   - Penyusunan pelaksanakan pemeriksaan terhadap berkas pertanggungjawaban keuangan dan keluar masuknya anggaran .
   - Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan verifikasi anggaran DPRD.
   - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahanyangdibahassebagaidasarpemahamandalamsebuahsistemserta metodeyangdipakaiuntuk kegiatan pengembangan terhadap sistemsendiri.

2.2.1. Sistem Informasi Data Pegawai

Sistem informasi adalah bagian dari sistem yang di organisasikan dan bekerja menggunakan teknologi informasi dengan cara mengumpulkan, memproses, mengatur, melaporkan dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi atau dengan kata lain sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari sekumpulan elemen yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan informasi yang di gunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. [4]. Sistem informasi data pegawai adalah proses komputerisasi pengolahan data mulai dari data data pegawai sampai data jabatan pegawai dengan ini dapat memudahkan *user* untuk mengolah data mengatur dan menjabarkan jabatan pegawai.

2.2.2. Basis Data

Basis data menurut Date (2000, p.5) pada dasarnya merupakan sistem penyimpanan record yang terkomputerisasi. Sistem basis data merupakan sistem komputerisasi yang bertujuan untuk menyimpan informasi dan memungkinkan pemakai untuk mengambil kembali dan memperbaharui informasi tersebut sesuai dengan keinginan dan permintaan.[5]

2.2.3. Data Base Manajemen Sistem (DBMS)

Data Base Manajemen Sistem menrupakan suatu sistem perangkat lunak (*software*) yang membantu pemakaian dalam mendefinisikan, menciptakan, mengatur dan mengontrol akses pada suatu basis data.

DBMS menyediakan beberapa fasilitas sebagai berikut :

2. *Data Definition Language* (DDL)

Memungkinkan user untuk membuat spesifikasi tipe data, mendefinisikan basis data, struktur data dan data constaint.

3. *Data Manipulation language* (DML)

Memungkinkan pemakai untuk memasukan, memperbaharui, menghapus, atau mengambil dari basis data.[3]

2.2.4. Pemodelan data

Pemodelan data dapat di gambarkan dengan ERD (*Entity Relationship Diagram*). *Entity Relationship Diagram* (ERD) merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menghubungkan antar elemen (*Relational Condition*), dimana pada tahap selanjutnya dapat diimplementasikan kedalam bentuk tabel relasi. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data, pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu:

1. Entitas

Entitas Adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkaran pemakaian dan sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat.

2. Atribut

Atribut merupakan elemen dari sebuah entitas yang berfungsi mendeskripsikan karakter entitas.

3. Hubungan

Hubungan atau relasi yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda [4]. ada beberapa macam hubungan antar relasi, antara lain:

a. Satu Ke Satu (*One to One*)

Satu ke satu adalah bentuk relasi antara satu entitas dengan sejumlah satu ke entitas dengan jumlah yang sama.

b. Satu Ke Banyak (*One to Many*)

Satu ke banyak adalah bentuk relasi dari entitas dengan jumlah satu ke entitas lain yang berjumlah lebih dari satu (Entitas dengan banyak alternatif tujuan).

c. Banyak Ke Banyak (*Many to Many*)

Banyak ke banyak adalah bentuk relasi yang mendeskripsikan permasalahan yang komplek yaitu hubungan antara entitas yang berjumlah lebih dari satu dengan entitas yang sama.

2.2.5. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan yang dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Dimana, permintaan dapat datang dari seorang manajer di luar departemen sistem informasi atau dari pihak eksekutif yang melihat adanya masalah atau menemukan adanya peluang baru. Sehingga tujuan

utama analisis sistem adalah untuk menetukan hal-hal detail yang akan dikerjakan oleh sistem yang akan diusulkan[6] Pada model analisis terdapat perangkat lunak yang dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Flowmap*

Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. *Flowmap* berguna untuk membantu analis dan programer untuk memecahkan masalah kedalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian. Biasanya *flowmap* mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut

2. Diagram Konteks

Diagramkonteks adalahtingkat tertinggidalam diagramaliran data danhanya berisisatu proses, yang mewakiliseluruh sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram konteks akan memberi gambaran tentang keseluruhan

sistem. Sistem dibatasi oleh *boundary* (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada *store* dalam diagram konteks.

3. *Data Flow Diagram* (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan

data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut.

Terdapat 4 (empat) macam simbol yang digunakan dalam *Data Flow Diagram* diantaranya:

a. Kesatuan luar (*external entity*) atau batas sistem (*Boundary*)

Kesatuan luar merupakan kesatuan (*entity*) di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan *input* atau menerima *output* dari sistem.

b. Arus data (*Data Flow*)

Arus data ini mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data ini ditunjukkan dengan symbol panah.

c. Proses (process)

Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.

d. Simpanan data (*Data Store*)

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa:

1) Suatu file atau *database* di sistem komputer

2) Suatu arsip atau catatan *manual*

3) Suatu kotak tempat data di meja seseorang .